

Forum Freedom, 13 Agustus 2007
Tema : Liberalisme di Indonesia
Narasumber : Rizal Mallarangeng (RM)

Hamid Basyaib (HB):

Halo. Selamat pagi saudara-saudara. Anda bersama saya, Hamid Basyaib, dalam acara Forum Freedom, sebuah acara yang disponsori oleh Freedom Institute bekerja sama dengan Kantor Berita Radio 68 H dan dipancarkan ke beberapa puluh radio lain di seluruh Indonesia.

Tamu saya pagi ini adalah Rizal Mallarangeng (RM). Selamat pagi Bung Rizal.

RM:

Selamat pagi.

HB:

Dia adalah Direktur Eksekutif Freedom Institute. Tema kita kali ini adalah Liberalisme di Indonesia.

Saya mulai dengan perkiraan Bank Pembangunan Asia yang memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia 2006 hanya 5,4%. Lebih rendah dari asumsi APBN, yaitu 5,8%.

Lalu juga ada berbagai masalah di bidang ekonomi, di mana Indeks Kebebasan Ekonomi menempatkan Indonesia sebagai *mostly unfree*. Laporan lain adalah dari Fraser Institute yang beberapa waktu yang lalu mengeluarkan *Economic Freedom of the World 2006*, yang antara lain memuat Indeks Kebebasan Ekonomi. Dari 130 negara yang disurvei, Indonesia mendapat skor 6. Atau di peringkat 83.

Dari survei Fraser Institute itu, yang memperlihatkan Indonesia sebagai *mostly unfree*, apa yang bisa anda katakan?

RM:

Sebenarnya kita lebih terbuka dibanding 30 tahun yang lalu. Memang dalam beberapa hal ekonomi kita perlu lebih dibuka lagi agar semakin terintegrasi dengan ekonomi dunia.

Tapi jangan lupa bahwa kalau kita bicara masa depan liberalisme di Indonesia, ini kan bukan hanya masalah keterbukaan ekonomi. Liberalisme juga mencakup keterbukaan budaya. Juga keterbukaan politik, yakni demokrasi, dan keterbukaan agama, yakni toleransi.

Jadi kita harus pilah-pilah. Di bidang politik memang masih ada tantangan dari kaum radikal, fanatik dan demagog. Tapi ada langkah-langkah dalam bidang politik yang semakin membuat kita lebih

demokratis.

Di bidang keagamaan juga demikian. Kita punya warisan agama-agama besar dunia yang hadir bersama di sini. Kita juga tidak terperosok ke dalam apa yang dikhawatirkan 4-5 tahun yang lalu, saat terorisme melanda dunia. Ternyata kita berhasil melewati fase ancaman terorisme dengan lebih baik. Dan dalam soal hubungan antar agama kita sebagai bangsa sudah cukup teruji.

Demikian juga dalam kehidupan kebudayaan secara umum. Kita tidak menutup diri terhadap pengaruh luar. Kita bergaul dengan orang Amerika, Cina, Jepang, dsb. Jadi secara kultural Indonesia kekuatannya adalah pada keterbukaan. Makanan kita misalnya adalah campuran dari berbagai jenis makanan dalam berbagai kebudayaan. Ini semua bertemu di Nusantara.

HB:

Dan kita memiliki kepercayaan untuk itu, ya.

RM:

Itu yang membuat saya optimistis di masa depan menyangkut liberalisme. Karena pada dasarnya kita adalah negeri yang terbuka, dan hanya bisa maju kalau menjadi sebuah negeri yang terbuka.

Yang dilakukan nenek moyang kita di masa lalu adalah sintesa kebudayaan yang luar biasa. Lihat saja wayang. Di sini Cina dan India dicampur. Demikian juga makanan kita. Ada gado-gado. Ini kan campuran berbagai macam hal.

HB:

Itu simbolisme yang paling sempurna, ya.

RM:

Itu simbolisme yang paling sempurna. Kita ini bangsa yang bersumber dari berbagai belahan dunia. Ada India, Arab, Cina, dsb.

HB:

Dan itu bagus.

RM:

Bagus sekali. Dan bisa menjadi sumber kekuatan kita. Kita bukan India. Kita bukan Cina. Kita bukan Arab. Kita bukan Barat. Tapi kita menggabungkan unsur-unsur itu menjadi Indonesia. Ini kan karena

kita ini terbuka. Kalau kita tertutup kita tidak bisa meramu kebudayaan-kebudayaan itu menjadi kekuatan.

Nah, itu yang membuat saya optimistis di masa depan. Meskipun di bidang ekonomi kita masih kurang terbuka. Tapi saya tekankan bahwa ekonomi bisa maju hanya kalau kita terbuka. Di masa yang akan datang saya yakin Indonesia akan menjadi semakin terbuka, dan mampu memanfaatkan proses globalisasi menjadi kekuatan bagi Indonesia.

HB:

Anda mengeluhkan bahwa di bidang ekonomi kita justru kurang terbuka. Ini berbeda dari banyak pengamat yang mengatakan bahwa ekonomi kita ini sudah terlalu liberal. Semua diswastanisasi, BBM dicabut subsidi, dsb.

RM:

Makanya cara pandang itu salah dan berbeda dengan saya. Mereka mengatakan bahwa kita sudah sangat terbuka, padahal kalau kita lihat pelaku ekonomi sekarang ini yang dominan bukan swasta, tapi masih negara.

Perusahaan terbanyak, BUMN. Pegawai terbanyak, BUMN. Saya bukan anti BUMN. Saya mau BUMN kita lebih bagus. Lebih bagus lagi kalau itu swasta. Tapi regulasi kita kan begitu luar biasa mencengkeramnya, tanpa ada suatu konsistensi yang jelas.

Meskipun harus kita akui banyak kemajuan, tapi banyak juga hal yang harus kita ubah. Pasal 33 masih menyangkut-nyangkut sentimen masa lalu tentang kepemilikan oleh negara.

Hal-hal semacam ini kan menunjukkan bahwa kita kurang terbuka. Kita kurang membuka pasar kita mengikuti logikanya sendiri. Tapi banyak orang berkata bahwa kita sudah terlalu terbuka. Ini menurut saya masalah cara pandang. Saya yakin kalau diuji secara empiris kita masih kurang terbuka.

Meskipun kita juga punya sebuah fase yang disebut sebagai deregulasi. Kita membuka berbagai sektor. Pasar modal kita adalah hasil deregulasi tahun 80-an. Demikian juga perbankan kita. Tanpa deregulasi 80-an, semua bank kita adalah bank milik negara.

Memang agak populis untuk berkata bahwa Indonesia sudah dikuasai asing dsb. Itu cerita lama. Pada tahun 75, saat Malari, bahasa itu pun sudah dikatakan. Padahal kita waktu itu baru membuka ekonomi sekitar 10%.

HB:

Jadi yang anda inginkan adalah semakin terbuka lagi, dan semakin

terintegrasi dengan ekonomi dunia.

RM:

Kalau kita semakin terbuka, berarti kita semakin memberikan kesempatan pengambilan keputusan ekonomi pada individu-individu. Pada aktor-aktor ekonomi sendiri. Pemerintah hanya memberikan peraturan yang adil, minimal tapi efektif. Jadi bukan banyak aturan tapi tidak dilaksanakan. Pemerintah cukup menjadi pengayom. Menjadi wasit yang adil. Tut wuri handayani.

HB:

Penting itu, Cel.

RM:

Ini warisan yang sangat berharga. Tinggal diaplikasikan saja.

HB:

Dan dikontekstualkan.

RM:

Dikontekstualkan. Tut wuri handayani. Pemerintah di belakang lah. Yang mengambil keputusan biar para pelaku sendiri. Jangan pengen di depan terus dan terus. Nggak mampu mereka.

HB:

Lebih baik minimum peran pemerintah ya. Peraturannya sedikit tapi efektif.

RM:

Lebih baik sedikit peraturan tapi fair dan adil, ketimbang banyak sekali peraturan tapi semua orang tahu bahwa itu sumber korupsi.

HB:

Atau justru peraturan itu dibuat banyak untuk membuka peluang korupsi.

RM:

Saya tidak mau suudzon. Saya tidak mau melihat niatnya. Tapi faktanya memperlihatkan bahwa banyak aturan yang tidak efektif. Mau ekspor harus melewati begitu banyak pintu birokrasi. Begitu tidak efisiennya dunia impor ekspor kita.

Demikian juga mengurus KTP dan SIM. Sekarang kalau mau mengurus SIM gimana. Kalau itu saja masih amburadul dan belum mampu, *mbok* jangan terlalu ngurusin yang lain.

HB:

Ini menarik sekali.

RM:

Jadi yang fundamental diperbaiki dulu. Jangan macam-macam.

HB:

Ini yang terbalik dari para pengkritik tadi. Mereka bicara tentang hal-hal yang besar, hubungan perdagangan dengan Amerika. Tapi anda bicara tentang tanjung priok, ekspor impor, dan pembuatan SIM.

RM:

Tentang hal-hal yang konkret. Peradilan kita itu kan hal yang sangat fundamental. Itu nggak bisa swasta. *Mbok* konsentrasi ke sana. Pilih peran-peran yang sangat penting dan lakukan dengan baik. Jangan juga terlalu menuntut pada pemerintah.

HB:

Ok, itu menarik sekali, Bung Celi. Baik Saudara, anda masih bersama saya, Hamid Basyaib, dalam Forum Freedom dan kita akan beristirahat sebentar. Dan akan kita lanjutkan setelah yang satu ini.

HB:

Selamat pagi kembali, saudara-saudara. Anda masih bersama saya, Hamid Basyaib. Kita masih dalam acara Forum Freedom. Tamu kita masih yang tadi, yakni Bung Rizal Mallarangeng.

Kita tadi sudah berbicara tentang banyak hal. Poinnya adalah bahwa pemerintah kalau bisa mengambil porsi peran yang sedikit tapi fundamental. Misalnya membenahi pengadilan. Ini tidak mungkin

swasta. Juga di bidang kepolisian, ini juga tidak mungkin ditangani swasta, di mana pun.

Nah, saya mau kembali ke kritik banyak orang yang menganggap bahwa Indonesia ini sudah kebablasan. Yang menarik, Bung Celi, orang-orang yang mengkritik ini adalah mereka yang menuntut kebebasan. Misalnya politik ingin lebih demokratis, di bidang agama mereka ingin lebih toleran dsb. Tapi begitu sampai di bidang ekonomi, mereka tiba-tiba surut lagi dan tidak boleh ada kebebasan. Bagaimana anda melihat hal seperti itu.

RM:

Memang ada kontradiksi di situ. Dalam beberapa hal kita sama. Dalam agama mereka mau toleransi. Dalam bidang politik mereka mau demokrasi. Dalam bidang kebudayaan apalagi. Kaum seniman kalau tidak ada kebebasan seperti ikan tanpa air.

HB:

Ya. Mereka tidak bisa berkarya, ya.

RM:

Tapi anehnya, dalam bidang ekonomi, kaum seniman yang paling bebas pun berkata harus ada proteksi. Ini kontradiksi. Dalam kebudayaan mereka ingin kebebasan yang seluasnya, dalam ekonomi mereka ingin dibatasi.

Buat saya itu inkonsistensi dari paham yang keliru. Ada hal-hal fundamental kenapa ekonomi harus dibedakan dari dunia budaya, agama dan politik.

Dalam politik kita ingin ada kebebasan berbicara dan berpendapat karena itu kan hak setiap orang. Di samping itu hal ini juga memiliki dampak yang baik, yakni orang jadi bisa saling mengontrol.

Nah, dalam ekonomi juga begitu. Jika setiap orang dibiarkan untuk mengambil keputusannya masing-masing, dengan peraturan yang sedikit tapi fair, maka kita bisa lihat buktinya bahwa kesejahteraan dan kepentingan umum itu semakin meningkat. Ini sudah terbukti.

Jadi dasar kebebasan berbicara dan kebebasan ekonomi itu sama.

HB:

Sama, ya. Jadi mereka tidak konsisten.

RM:

Ekonomi adalah ekspresi kehidupan. Agama, politik, budaya, ekonomi adalah ekspresi dari kehidupan yang sama. Hidup ini kan satu dan utuh.

HB:

Tapi ekspresinya macam-macam.

RM:

Macam-macam. Saya mencintai istri saya. Saya ingin mencari penghasilan. Saya ingin mencari teman yang baik. Saya ingin menjadi teman yang baik, saya ingin menjadi anak yang baik, dsb.

HB:

Itu orang yang sama ya.

RM:

Orang yang sama. Dengan berbagai macam dimensi, aspirasi yang macam-macam. Kebudayaan juga begitu. Masyarakat Indonesia punya kebudayaan Indonesia, ekonomi Indonesia, politik Indonesia. Beda-beda tapi satu jua.

HB:

Bhineka Tunggal Ika.

RM:

Bhineka Tunggal Ika.

HB:

Nah, ini yang menarik. Mereka itu menganggap bahwa semua kebebasan yang lain itu baik, namun ketika sampai pada bidang ekonomi dianggap buruk.

RM:

Itu karena paham yang keliru. Ini tolol betul. Hong Kong itu negara paling bebas, tapi maju dan sejahtera.

HB:

Ini menarik tadi anda menyebut seniman. Saya teringat pidato Harry B. Priyono beberapa waktu lalu di DKJ. Dia persis menyinggung apa yang tadi anda katakan itu.

RM:

Ok, saya tidak nyaman mengkritik orang yang tidak ada di sini, dan tidak bisa membela diri.

HB:

Ini menarik karena pidato itu diberikan di kalangan seniman yang notabene sangat membela kebebasan.

RM:

Mungkin kita kurang berdialog dengan seniman. Tapi kita ingatkan bahwa hidup ini satu jua. Kebebasan kebudayaan memiliki dasar yang sama dengan kebebasan di bidang ekonomi.

HB:

Karena ini akhir tahun, kita cobalah lihat ke depan. Apa yang menurut anda akan terjadi di tahun 2007.

RM:

Arah umumnya saya senang. Saya optimistis dengan keterbukaan budaya Indonesia karena secara tradisi kita terbuka.

Jadi di masa depan saya melihat banyak alasan untuk menjadi semakin terbuka. Toleran di bidang ekonomi, politik, agama dan budaya.

HB:

Kalau khusus di bidang ekonomi bagaimana anda melihatnya.

RM:

Angka-angka temporer sih kurang baik. Investasi asing tidak meningkat malah cenderung menurun. Langkah-langkah deregulasi juga gregetnya kurang terasa, dan belum begitu terasa dampaknya.

HB:

Ini agak aneh ya. Ini negara yang makin demokratis tapi dalam kebijakan ekonomi seperti itu kita kayak *silent oppression*.

RM:

Mungkin kita butuh waktu juga, Mid. Kita perlu menyiapkan masyarakat. Secara politik masih banyak yang menentangnya.

HB:

Ini tidak produktif ya.

RM:

Tidak produktif. Kita juga jangan terlalu menuntut kaum politisi apa yang tidak mungkin mereka lakukan. Meskipun mereka senang dengan ideal-ideal besarnya, tapi mereka itu politisi, mereka berpikir tentang kemungkinan dipilih kembali, dsb.

Tugas kaum pemikir itu mengemukakan hal terbaik sejauh-jauhnya, tugas politisi itu menerapkannya dengan mengikuti logika politik. Itulah Indonesia. Itulah pergaulan kita dengan teman-teman setanah air. Kita upayakan apa yang masih bisa diupayakan.

HB:

Terus menerus ya.

RM:

Terus-menerus. Jangan mau enaknja saja. Sekali pukul sekali jadi, semua pemimpin mau ikut. Itu mimpi yang sebenarnya kontraproduktif. Lebih baik kita berfikir secara produktif.

HB:

Jika anda diminta pemerintah, Bung Celi apa yang perlu dilakukan di bidang ekonomi, itu sektor-sektor khusus apa yang perlu diberi perhatian khusus.

RM:

Yang paling utama mungkin adalah kemungkinan investasi dari luar. Sekarang ini kita tidak punya cukup dana untuk melakukan pembangunan yang kita inginkan. Kita perlu suntikan investor luar negeri.

Hal lain adalah wewenang pemerintah pusat dan daerah yang jelas. Kemudian bagaimana kita mempermudah kaum usahawan kita sendiri untuk melakukan ekspor dan impor.

Kemudian tentang kepastian hukum yang lebih baik. Ini akan mempermudah masyarakat kita di masa depan.

HB:

Beberapa hal sepertinya mudah dilakukan. Ok, Terima kasih sekali, Bung Rizal. Sayang sekali waktunya habis. Terima kasih atas kehadiran anda di studio. Saudara-saudara begitulah akhir Forum Freedom minggu ini. Anda bisa berkomentar ke 021-70497497. Saya Hamid Basyaib mohon diri, kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalam.